

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berkembang yang membutuhkan banyak dana untuk memperlancar pembangunan diseluruh aspek dalam negaranya. Untuk memperoleh dana yang cukup untuk pembangunan negara, maka diperlukan adanya pajak untuk menunjang pemasukan negara. Dalam hal ini pajak merupakan sumber alternatif untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan dalam hal pembangunan, semakin tinggi pajak yang diperoleh dapat mengurangi beban negara dan dapat memperlancar pembangunan untuk Negara Indonesia.

Peran masyarakat Indonesia sangat penting dalam rangka mendukung penerimaan negara dalam bidang perpajakan. Hal ini dikarenakan pajak yang telah didapat dan digunakan oleh pemerintah akan kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk sarana dan prasarana penunjang dalam beraktivitas, dengan hal ini pemerintah berharap kepada masyarakat untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dalam setiap pembangunan terdapat perkembangan yang signifikan yang terjadi dalam masyarakat untuk menunjang aktivitas supaya menjadi lebih mudah seperti perkembangan teknologi, pendidikan, maupun otomotif sebagai contohnya kendaraan bermotor. Banyaknya permintaan kendaraan bermotor dapat menyebabkan peningkatan di setiap tahunnya.

Beberapa masyarakat lebih memilih menjual kendaraannya dengan mengganti yang baru atau dengan cara tukar-menukar, bisa juga mendapatkan hibah atau mendapatkan warisan dari orang tua. Dengan fenomena ini maka akan terjadi lonjakan permintaan pergantian kepemilikan kendaraan bermotor akan berakibat timbulnya pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

Bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri memiliki arti yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual-beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Dalam hal ini obyek bea balik nama kendaraan bermotor yaitu penyerahan kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran kotor *gross tonnage* 5 sampai dengan *gross tonnage* 7.

Pajak bea balik nama kendaraan bermotor masuk dalam kategori pajak daerah (provinsi). Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga pajak termasuk sumber penerimaan daerah yang dapat mendorong pembiayaan pengeluaran daerah dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah dan adanya undang-undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Dalam hal ini pajak-pajak yang

diselenggarakan di daerah atau provinsi menjadi salah satu sumber penerimaan negara dan masuk kedalam pendapatan asli daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan, hal ini sangat berhubungan dengan pajak, pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor yang memberikan kontribusi besar bagi sumber penerimaan negara salah satunya adalah pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

Terdapat banyak sekali peran kantor bersama samsat di seluruh Indonesia sebagai sarana pemungut pajak-pajak kendaraan bermotor. Samsat sendiri memiliki arti yaitu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Contoh dari samsat adalah dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor,

Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan “Kantor Bersama Samsat”. Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), sedangkan PT Jasa Raharja

mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Di Samsat itu sendiri pemilik kendaraan bermotor diharuskan datang ke Samsat setiap tahun untuk mengesahkan STNK, selain itu juga Samsat melakukan penagihan jika wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor apabila pajak terutang tidak melunasi setelah jatuh tempo pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari jurnal-jurnal sebagai acuan atau referensi untuk membuat latar belakang dengan sumber :

1. Eri (2012) “Tata Cara Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Dinas Pendapatan Provinsi Riau kota Pekanbaru”
2. Repository Universitas Andalas “Sistem dan Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi di Bukittinggi”

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti masalah pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat atau wajib pajak yang kurang mengetahui atau memahami mekanisme bea balik nama kendaraan bermotor baik dalam segi pengurusannya maupun pembayarannya. Masyarakat akan lebih memilih jasa pengurus atau biasanya disebut makelar untuk menguruskan dokumen-dokumen, padahal jasanya ditawarkan makelar akan lebih banyak mengeluarkan biaya yang lebih tinggi daripada masyarakat atau wajib pajak mengurusnya sendiri. Maka dari penjabaran latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil judul **“MEKANISME**

PEMUNGUTAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT SIDOARJO”

1.2 TUJUAN STUDI LAPANG

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

1.3 MANFAAT ATUDI LAPANG

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk memenuhi syarat tugas akhir serta untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan perhitungan pajak bea balik nama kendaraan bermotor

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat khususnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang kemudahan dalam mengurus pajak bea balik nama kendaraan bermotor milik pribadi.

1.4 RUANG LINGKUP STUDI LAPANG

Penulisan laporan ini hanya membatasi pembahasan mekanisme pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di kantor bersama

Samsat Sidoarjo pada tahun 2018, hal ini bertujuan agar pembahasan tidak terlalu luas.

1.5 METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data yang akurat. Dalam memperoleh data tersebut maka penulis menggunakan jenis data yaitu Data Sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk laporan, catatan, dan dokumen melalui Kantor tempat penelitian dan penulis juga menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung kepada obyek yang diteliti ditempat penulis melakukan praktik kerja lapangan
2. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengambil dokumen atau jurnal serta data-data ditempat praktik kerja lapangan untuk dijadikan acuan mengerjakan Tugas Akhir.